PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

(Studi kasus pada Pemerintah Kota Bandung Divisi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset)

SAN SANTRI PRATIWI – 21113200

Pembimbing
Angky Febriansyah,SE.,MM

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2017

ABSTRACT

The research was purpose to find out how much influence the Regional Financial Management Information System to get good financial statements. To find out how much influence the Regional Financial Accounting System to get the appropriate financial statements and quality in Bandung City Government. There is a phenomenon in 2016 which shows that the variable Information Systems Management of Regional Finance has not run well when the Regional Financial Accounting System has been applied.

The method used is descriptive and verifikatif analysis. The population in this study is keryawan or staff who are in the Financial and Asset Management Agency in Bandung. The data used in this study is the questionnaire data that is distributed to respondents or employees in the Financial and Asset Management Agency in Bandung. Of the total 34 questionnaires distributed, only 29 questionnaires from respondents were returned and can be processed.

The result of hypothesis testing in this research in Bandung City Government shows that (1) the change of financial management information system of the region has a significant positive effect on the quality of financial statements in Bandung City Government, (2) changes in Regional Financial Accounting System has a significant positive effect on profit In Bandung City Government.

Keywords:Regional Financial Management Information System, Accounting System, Quality of Financial Statement.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Safrida Yuliani, 2012). Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi laba yang digunakan perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan guna mencapai tujuan perusahaan (V. Wiratna Sujarweni, 2015: 7). Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor computer (V. Wiratna Sujarweni, 2015: 7). Informasi dalam laporan keuangan banyak digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan guna mengambil suatu keputusan (Kadek Desiana Wati, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 1 Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode, dan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. Sistem adalah suatu

rangkaian yang berfungsi menerima *input* (masukan), mengolah *input,* dan menghasilkan *output* (keluaran) (V. Wiratna Sujarweni, 2015: 1).

Sistem Informasi adalah suatu sistem yang ada di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelohan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat menajerialkan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tentu dengan laporan yang diperlukan (Ais Zakiyudin, 2012: 13). Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Rosmery Elsye, 2016: 2).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 1 tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pemerintah daerah selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya dalam rangka mempertanggungjawabkan keuangan negara (Ni Made Rika Krisna Dewi, 2014).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pemda Kota Bandung mendapat opini WDP, padahal sudah menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
2. Pemda Kota Bandung mendapatkan opini WDP, padahal sudah diterapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Seberapa besar pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Untuk mengetahui sebagaimana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat di terima dan digunakan oleh pegawai sebagai sarana untuk mempermudah pegawai dalam membuat laporan keuangan dan melihat kualitas laporan keuangan. Dan Penerapan / Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemda Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Pemda Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kota Bandung dalam melihat pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) pada kualitas laporan keuangan dan penerapan / implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian yang dilakukan secara langsung ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti yaitu pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah di pemerintah Kota Bandung serta melihat kesesuaian teori yang ada dengan praktik di lapangan.

II. Kajian Pustaka, Krangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

2.1.1.1 Pengertian SIPKD

Menurut Rosmery Elsye (2016:2) mengumakakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.1.1.2 Fakor-Faktor yang mempengaruhi SIPKD

Menurut Rosmery Elsye (2016:56) adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi SIPKD, yaitu : Pengendalian Intern, Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruh Efektivitas SIPKD.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

2.1.2.1 Pengertian SAKD

Menurut Deddi Nordiawan (2010:201) Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.

2.1.2.2 Indikator SAKD

Menurut Deddi Nordiawan (2010:225) Melalui penggunaan yang sesuai prosedur yang memulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan agar bias mempertanggungjawabkan pada pelaksanaan anggaran-anggaran daerah.

2.1.3 Laporan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:8) Laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya merupakan keempat karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

2.1.3.2 Indikator Laporan Keuangan Daerah

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:15) adapun beberapa yang menjadi penggunaan yang perlu diwujudkan agar laporan keuangan daerah ini bias diukur dilihat dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan apakah dapat dipahami laporan keuangan daerah yang sudah disusun sehingga memenuhi standar yang berlaku.

2.2 Krangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh SIPKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Beberapa ahli menyatakan bahwa ada hubungan antara SIPKD terhadap kualitas laporan keuangan Menurut (Mardiasmo 2002:67) bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu instuti dapat berjalan dengan baik bila

terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula, ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran pendapatan belanja daerah memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang akuntabel sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang bekualitas harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi.

Selanjutnya Hasil penelitian menurut P.Ayu Ratna Dewi (2014) hail penelitiannya mengemukakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Selanjutnya, menurut Burhanuddin Baharuddin (2016) hasil penelitiannya mengemukan bahwa Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.2.2 Pengaruh SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Beberapa ahli menyatakan bahwa ada hubungan antara SAKD terhdap kualitas laporan keuangan Menurut **(**Mardiasmo 2004:35) Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal, sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan, sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tutun Hermawanto Botutihe (2013) menunjukkan bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo. Hal ini menandakan bahwa semakin baik penerapan SAKD maka semakin berkualitas laporan keuangan daerah.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan krangka pemikiran diatas, penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

H_2 : Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

III. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian adalah:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Sedangkan menurut Umi Narimawati (2010:29) metode penelitian adalah sebagai berikut :

“Cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu”.

Dari definisi metode penelitian di atas maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara penelitian untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2011:147):

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Sedangkan, Mashuri (2008:45):

"Mendefinisikan metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupannya".

3.2 Operasional Variabel

Oprasionalisasi variabel menurut Sumadi (2013:29) menyatakan bahwa oprasionalisasi variabel adalah:

" Definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Konsep dapat diamati atau observasi ini penting, karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain."

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat sumber data dan teknik penumpulan data, berikut ini adalah penjelasannya.

3.3.1 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2011:137):

"Menyatakan bahwa sumber data penelitian dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer diperoleh dimana data yang diperoleh penulis merupakan data yang diperoleh secara langsung, dengan mengadakan penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk para pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) yang terdapat di Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2014:6) metode survei didefinisikan sebagai berikut:

"Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mendengarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur".

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulisan dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:40) kuesioner didefinisikan sebagai berikut:

"Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini".

Hasil dari kuesioner yang disebarkan dilihat dari tingkat kuesioner yang kembali dan dapat dipakai. Persentase dari pengisian kuesioner yang diisi dibandingkan dengan yang disebarkan dikatakan sebagai *response rate* (tingkat tanggapan responden).

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Popilasi

Sugiyono (2014:80) mengungkapkan bahwa populasi adalah:

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."

3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:131):

"Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Sedangkan, Sugiyono (2010:118):

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dan sifat yang mewakili seluruh populasi yang ada".

Dikarenakan jumlah responden yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) yang terdapat di Pemerintah Kota Bandung - Provinsi Jawa Barat yaitu berjumlah 34 pegawai, maka peneliti memilih untuk menggunakan sampel jenuh dengan menetapkan tingkat kepercayaan/keyakinan 95% dan nilai *error* 5%. Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mengetahui seberapa besar Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA), Pemerintah Kota Bandung - Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2017 sampai dengan selesai.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Cooper yang dikutip Umi Narimawati, dkk. (2010:42), validitas didefinisikan sebagai berikut:

"*validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researhcer actually wishes to measure".*

Menurut Sugiyono (2010:2) mendefinisikan valid adalah sebagai berikut:

"valid adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti".

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner itu benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Semua item pertanyaan dalam kuesioner harus diuji keab sahannya untuk menentukan valid tidaknya suatu item. Validitas dapat diartikan sebagai suatu karakterstik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Validitas suatu data tercapai jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel.

1. Item instrument dikatakan valid jika t-hitung < t tabel maka instrument tersebut dapat digunakan.
2. Item instrument dikatakan tidak valid jika t hitung > t tabel maka item tersebut tidak dapat diguakan.

3.5.2 Uji Reabilitas

Menurut *Cooper* dalam Umi Narimawati (2010:43), reliabilitas adalah sebagai berikut:

"*Reliability is a characteristik of meansurenment corcerned with acuracy,precision, and consisteny".*

Realibitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan atau kehandalan *(dependability)* hasil pengukuran yang diperoleh dari instrumen tertentu. Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika pengkurannya konsisten,cermat dan akurat. Jadi uji reliabilitas instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama *(homogen)* diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah.

Dalam hal ini, relatif sama berarti tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecl diantara hasil beberapa kali pengukuran. Tinggi rendahnya reabilitas, secara empirik ditunjukkan oleh suatua angka yang disebut koefisienreliabilitas. Secara teoritis, besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00 sampai dengan ± 1,00 dan interpretasinya selalu mengacu pada koefisien yang positif.

Dalam konteks ni, koefisien realiblitas yang mendekati nilai satu, menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan, kehandalan atau tingkat kansistensi dari instrumen penelitian dalam mengukur apa yang hendak diukur (Nunally dalam Imam Ghozali: 2006).suatu konstruk item pernyataan kuesioner dikatakan handal atau reliabel berdasarkan *cronbach's Alpha* jika memberikan nilai *a > 0,60* (Nunally dalam Imam Ghozali: 2006).

3.6 Metode Analisis Data

Menurut, Umi Narimawati, dkk (2010:41):

"Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

3.6.1 Analisis Data Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2010:44):

"Analisis deskriptif adalah Metode penelitian deskriptif (kualitatif) itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail".

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data untuk metode penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Setiap indikator yang dinilai responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.
2. Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
3. Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor

3.6.2 Analisis Data Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan struktural berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan *software Smart PLS* 2.0. Menurut Imam Ghozali (2006:1):

"Metode *Partial Least Square* (PLS) dijelaskan sebagai model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*)".

Peneliti menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_o) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (H_a) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang disebar kepada 34 pegawai Pemerintah Kota Bandung Pada Divisi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset (BPKA). Dalam variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 6 item pernyataan, variabel Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari 3 item pernyataan dan variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah juga terdiri dari 4 item pernyataan.

4.1.1 Tingkat Pengembalia Kuesioner

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu peneliti menyebarkan kuesioner kepada objek penelitian. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang ingin diketahui oleh peneliti. Rincian pengembalian kuesioner *(respon rate)* kepada 34 Pegawai Pemerintah Kota Bandung Pada Divisi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset (BPKA).

Tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) adalah sebesar 85,29%, yang didapatkan dan dihitung dari persentase jumlah kuesioner yang kembali (29 kuesioner) dibagi jumlah kuesioner yang disebarkan (34 kuesioner). Tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) sebesar 85,29% dan termasuk kriteria *very good* (sangat baik), artinya tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) dapat diterima dan hasil jawaban kuesioner dapat diolah, karena *response rate* lebih besar dari krieria *acceptable* (dapat diterima).

4.1.2 Profil Responden

Responden pada penelitian ini adalah kepada 29 Pegawai Kantor Pemerintah Kota Bandung Pada Divisi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset (BPKA).

Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini meliputi jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia dan jabatan.

Diketahui profil dari jumlah pegawai yang merupakan responden pada Kantor Pemerintah Kota Bandung Pada Divisi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset (BPKA) berdasarkan jenis kelamin. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 13 orang atau sebesar 41 % dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 16 orang atau 59%. Hal ini dikarenakan wanita lebih teliti dalam masalah keuangan dibandingkan dengan laki-laki jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai yang bekerja di Kantor Pemerintah Kota Bandung Pada Divisi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset (BPKA) adalah wanita.

Diketahui bahwa profil dari jumlah pegawai yang merupakan responden pada Kantor Pemerintah Kota Bandung Pada Divisi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset (BPKA), sebagian besar berdasarkan tingkat pendidikan. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang tingkat pendidikan nya Strata 1 (S1) berjumlah 16 orang 55%, tingkat pendidikan nya strata 2 (S2) berjumlah 9 orang atau 31%. Dan tingkat pendidikan nya lainya (Diploma 1 / 3) berjumlah 4 atau 14%. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan S1 lebih dominan karena Untuk melamar menjadi pegawai yang bekerja di Kantor Pemerintah Kota Bandung Pada Divisi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset (BPKA) minimal S1 atau strata 1.

Diketahui bahwa profil dari jumlah pegawai yang merupakan responden pada Kantor Pemerintah Kota Bandung Pada Divisi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset (BPKA), sebagian besar berdasarkan usia . Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang usia kisaran 22-30 tahun berjumlah 9 orang 31%, usia nya kisaran 31-46 berjumlah 16 orang atau 55%. Dan usia kisaran 47-60 berjumlah sebanyak 4 orang atau 14%. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa usia 31-46 lebih dominan, dikarenakan usia 31-46 tahun merupakan usia mapan seseorang dan masih produktif dalam bekerja.

Dapat diperoleh informasi bahwa mayoritas responden dengan tingkat lamanya bekerja antara <5 sebanyak 7 orang (24.14%) , 5 – 10 tahun sebanyak 10 orang (34,48%), 10-15 tahun sebanyak 8 orang (27,59%) dan yang lebih dari 15 tahun sebanyak 4 orang (13.79%). Dapat disimpulkan bawa lamanya bekerja 5-10 tahun lebih dominan dibanding yang lain, Hal ini dikarenakan banyak nya pegawai yang berumur diantara 31 sampai 46 tahun.

4.1.3 Pengukuran Kualitas Alat Ukur

Sebelum dianalisis, data hasil penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan memiliki keabsahan (*validity*) dan keandalan (*reliability)* berupa butir item pernyataan yang diajukan kepada responden telah mengukur secara cermat dan tepat apa yang ingin diukur pada penelitian ini.

4.1.3.1 Validitas

Pengujian validitas ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu alat ukur dinyatakan valid atau sah apabila memiliki nilai koefisien validitas > 0,30. Dengan menggunakan *software* SPSS 16.0, pernyataan yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,3 (>0,30), sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid

.

4.1.3.2 Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji keandalan dari suatu alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji keandalan dari alat ukur digunakan tehnik belah dua atau sering disebut *Split Half*. Dengan menggunakan *software* SPSS 16.0, Nilai koefisien reliabilitas untuk masing-masing variable lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan sebagai acuan studi ini, dapat dipercaya (reliabel) atau andal.

4.1.4 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran tanggapan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan maupun variabel penelitian secara keseluruhan yang meliputi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah. Dalam penelitian ini, tanggapan responden terhadap setiap pernyataan akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase sehingga mempermudah peneliti dalam menjelaskan hasil tanggapan responden.

4.1.4.1 Tanggapan Responden Mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, penulis mengunakan nilai persentase skor. Pada variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 6 (lima) item dari indikator: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan.

Indikator-indikator tersebut memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 67.36% berada di antara interval 52%-68%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kategori cukup baik, sehingga pada indikator pertanggungjawaban dan pengawasan sudah dalam kategori baik tetapi pada indikator lainnya masih dalam kategori cukup baik maka hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1.4.2 Tanggapan Responden Mengenai Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, penulis mengunakan nilai persentase skor. Pada variabel Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah terdiri dari 3 (tiga) item indikator. Indikator-indikator tersebut adalah Pencatatan, Pengikhtisaran, dan Pelaporan.

Berikut rekapitulasi dari indikator memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 293 (67,36%) berada di antara interval 52%-68%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berada dalam kategori cukup baik, sehingga pada indikator pengikhtisaran dan pelaporan sudah dalam kategori baik tetapi pada indikator pencatatan masih dalam kategori cukup baik maka hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

4.1.4.3 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah, penulis mengunakan nilai persentase skor. Pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah terdiri dari 4

(empat) item indikator: Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami. Indikator-indikator tersebut memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 393 (67.76%) berada di antara interval 52,01%-68,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah berada dalam kategori cukup baik, sehingga pada indikator andan dan dapat dipahami sudah dalam kategori baik tetapi pada indikator lainnya masih dalam kategori cukup baik maka hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam kualitas Laporan Keuangan Daerah.

4.1.5 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Pada bagian ini akan disajikan hasil analisis verifikatif mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Kantor Pemerintah Kota Bandung Pada Divisi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset (BPKA) menggunakan *software SmartPLS.*

4.1.5.1 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model)*

Evaluasi terhadap *outer model* digunakan untuk melihat hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel *manifest*nya (*measurement model*). Untuk mengevaluasi outer model, digunakan pengujian validitas dan reliabilitas.
Dalam uji validitas dalam *Partial Least Square* (PLS) terbagi atas dua bagian yakni *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity.*

4.1.5.2 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan nilai koefisien *path* dan *t-values.*

1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangaan Daerah (SIPKD) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 25.10% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Implementasi Sitem Akuntansi Keuangan Daerah memberikan kontribusi pengaruh sebesar 28.00% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Pada tabel di atas, terlihat nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,531 atau 53,10 %.

Hasil tersebut menunjukan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangaan Daerah (SIPKD) (X_1) dan Implementasi Sitem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 53,10% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), sedangkan sebanyak (1-*R Square*) 46.90% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti (ζ) seperti kompetensi pengelolaan keuangan dan pengaruh efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

4.1.5.3 Pengujian Hipotesis

Untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel laten eksogen tersebut signifikan atau tidak, dilakukan pengujian hipotesis

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) (Hipotesis 1)

H_0 :Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

pada Kantor Pemerintah Kota Bandung Pada Divisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA)

H_a :Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Kantor Pemerintah Kota Bandung Pada Divisi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset (BPKA)

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0.05%

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Tolak Ho dan terima Ha jika nilai $t_{hitung} > t_{kritis}$
2. Terima Ho dan tolak Ha jika nilai $t_{hitung} < t_{tkritis}$

Nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 2,978. Nilai tersebut lebih besar dari 1,706, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima $H_{a,}$ artinya bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Kantor Pemerintah Kota Bandung pada Divisi Badan Pengelolaan Keuangaan dengan kontribusi pengaruh sebesar 25,10%.

Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) Terhadap Kualitas Laporan keuangan Daerah Y) (Hipotesis 2)

H_0 :Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Daerah pada Kantor Pemerintah Kota Bandung Pada Divisi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset (BPKA)

H_a :Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Daerah pada Kantor Pemerintah Kota Bandung Pada Divisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA).

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0.05%

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Tolak Ho dan terima Ha jika nilai $t_{hitung} > t_{kritis}$
2. Terima Ho dan tolak Ha jika nilai $t_{hitung} < t_{tkritis}$

Nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 3.969. Nilai tersebut lebih besar dari 1.706, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima $H_{a,}$ artinya bahwa Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada pada Kantor Pemerintah Kota Bandung pada Divisi Badan Pengelolaan Keuangaan dengan kontribusi pengaruh sebesar 28.00%

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) berpengaruh sebesar 25,10% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,592 yang berarti Sistem –gh78Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor Pemerintah Kota Bandung pada Divisi Badan Pengelolaan Keuangaan.

Arah hubungan positif Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah menunjukan bahwa semakin baik sistem informasi Pengelolaan Keuangaan Daerah maka akan di ikuti dengan semakin baik nya kualitas laporan keuangan daerah. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan pengaruh sebesar 25.10% terhadap Kualitas Laporan Keuangan , sedangkan sisanya 74,90% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti pengendalian intern, kompetensi pengelolaan keuangan dan pengaruh efektivitas SIPKD.

4.2.2 Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhdap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Implementasi Sitem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) berpengaruh sebesar 28.00 % terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,613 yang berarti implementasi sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh yang tinggi arah positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah kota bandung divisi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset (BPKA).

Arah hubungan positif sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan kualias laporan keuangan daerah menunjukan bahwa Implementasi Sitem Akuntansi keuangan daerah yang semakin baik akan diikuti dengan kualitas laporan keuangan baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Implementasi Sitem Akuntansi keuangan daerah Daerah memberikan pengaruh sebesar 28.00% terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sisanya 72.00% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti pengendalian intern, kompetensi pengelolaan keuangan dan pengaruh efektivitas SIPKD.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Implementasi Sitem Akuntansi keuangan daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 67,36% dan termasuk cukup baik yang artinya Implementasi Sitem Akuntansi keuangan daerah belum baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondenya adalah indikator pencatatan sebesar 53,79%, terdapat gap sebesar 46,21% yang merupakan masalah yang ada pada pencatatan. Selanjutnya indikator pengikhtisaran 75.17% lalu indikator terakhir yaitu pelaporan 73.10%. masuk dalam kategori baik. Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator pencatatan dengan persentase 53,79% dapat diinterpretasikan dalam cukup baik, dan masih terdapat *gap* sebesar 46,21%.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah kota Bandung Divisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA). Maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem informasi pengelolaa keuangan daerah berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan daerah. Dengan kategori cukup baik, yang artinya semakin baik sistem informasi pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah. Namun ada beberapa yang menyebabkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum maksimal yaitu pelaksanaan dan pelaporan. Sehingga sistem informasi pengelolaan keuangan daerah kurang baik dan berimbas pada kualitas laporan keuangan daerah yang kurang baik/maksimal. Pada penelitian ini sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terjadi di Pemerintah Kota Bandung pada Divisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset berada dalam kategori cukup baik, tetapi hal tersebut menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada sistem tersebut.
2. Implementasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintah kota bandung divisi badan pengelolaan keuangan dan aset (BPKA). Artinya semakin baik sistem informasi akuantasi keuangan daerah maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah. Namun ada yang menyebab kan sistem akuntansi keuangan daerah belum maksimal yaitu kurang mendukungnya pencatatan sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah kurang baik. Dan berimbas pada kualitas laporan keuangan daerah yang menjadi kurang

baik/maksimal. Pada penelitian ini sistem akuntansi keuangan daerah yang terjadi pada Kantor Pemerintah Kota Bandung berada dalam kategori cukup baik, salah satunya dikarenakan belum optimalnya sistem akuntansi dalam pencatatan, hal tersebut menandakan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada sistem akuntansi.

5.2 Saran

Setelah peneliti memebrikan kesimpulas dari hasil penelitian tentang pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kantor Pemerintah Kota Bandung, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Saran Praktis/Operasional

Badan Pengelola Keuangan dan Aset khususnya bagian sistem akuntansi di Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan ketelitian dalam menggunakan sistem akuntasi dengan standarisasi yang optimal, nilai yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dan pengalaman pegawai, agar kualitas laporan keuangan dapat meningkat lebih baik lagi. Sedangkan yang perlu diperhatikan oleh instansi adalah diadakannya pelatihan-pelatihan yang keberlanjutan terutama untuk pengguna sistem akuntansi yang masih belum punya pengalaman banyak sebagai acuan dan juga memberikan pembekalan materi yang lebih dalam penerapan sistem akuntansi untuk mendukung pegawai menjadi lebih teliti dalam menggunakan sistem akuntansi agar menjadi optimal dan tidak terjadi kesalahan. Selain itu juga memberikan saksi bagi pegawai yang tidak mengikuti pelatihan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung.

2. Saran Akademik

a. Bagi Pengembang Ilmu

Diharapkan agar para peneliti lain dapat lebih memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem informasi keuangan daerah.

b. Bagi Peneliti Lain

Disarankan pada penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan metode yang sama tetapi unit analisis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori akuntansi keuangan dan konsep diterima secara umum.

VI. Daftar Pustaka

Abdul Halim dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.sa

Abdul Hafiz Tanjung. 2014. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Bandung: Alfabeta

Agus Purwoto. 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Desckripte.* Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Ais Zakiyudin. 2012. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi 2. Jakarta: Mira Wacana Media.

Andriani, Wiwik. 2010. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan)*. Jurnal Akuntansi & Manajemen, 5 (1): h: 69-80.

Atyanta, R. 2012. *Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Volume1,Nomor1,2012.http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/310/257

Azhar Susanto. 2009. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi Perdana. Bandung: Lingga Jaya.

Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
Barker et al. 2002. *Metodologi Penelitian.* Edisi Pertama. Jakarta: Erlangga.
Burhanuddin Baharuddin. 2016. *Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah.* Jurnal Ilmiah STIE AMKOP Makassar Vol.3 No.3. ISSN: 2089-9378.
Chabib, Soleh, dan Rohcmansjah Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokusmedia.
Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Indeks
Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi sector public*. Jakarta: Salemba Empat.
Dr. Rosmery Elsye, S.H,.M.Si. 2016. *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor. Ghalia Indonsia.
Erlina Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.
Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Guilford. 1956. *Metodologi Penelitian Statistik.* Edisi Pertama. Bandung. Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
Hasan. 2013. *Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung*. Melalui: http://www.detik.com.
Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan. 2012. *Komitmen Organisasi Memoderasi*
Iman Mulyana. 2010. *Manajemen dan Kehidupan Manusia*. Ebook. Melalui: http://books.google.co.id/books?id=Wcy1sDN0gZ0C&pg=PA96&dq=kualitas+adalah&hl=id&ei=jSVGTujhNYXVrQeM9KTTAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCwQ6AEwAQ#v=onepage&q=kualitas&f=false
Indra Bastian. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni KadekSinarwati. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.* Jurnal Akuntansi. Vol 2 No. 1 Tahun 2014.
Lijan Poltak Sinambela. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press
Mamesah,D.J, 2010. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1995.
Mardiasmo. 2002.*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
Mardiasmo. 2004.*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
Mashuri. 2008. *Penelitian Verifikatif.* Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
Nanang Martono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Ni Made Rika Krisna Dewi. 2014. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada 10 Skpd Berupa Dinas Di Kabupaten Jembrana)*. Jurnal. Singaraja. Melalui: http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2883
Nurhayati Soleha. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap AKuntabilitas Keuangan (studi pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten).* Jurnal Etikonomi Vo. 13 No.1.
Ovita Charlina. 2013. *Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum.* Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 3, 2013: 82-94 ISSN 2303-0348.
P. Ayu Ratna Dewi. 2014. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan.* E-jurnal. ISSN: 2302-8556.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuagan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Trinomika Vol 11 No 1 hlm 29-39.ISSN 1411-514X. Universitas Pasundan Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Republik Nomor 13 Tahun 2006. Tentang *Pedoman Dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Republik Nomor 8 Tahun 2006. Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Prasetya, Gede Edy. 2005. *Penyusunan Dan Analisis Laporan Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Perndekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Sutarman. 2012. *Buku Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tata Sutabri. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi

Tutun Hermawanto Botutihe. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo.*

Uce Indahyanti. 2013. *Metodologi Penelitian.* Edisi Kedua. Jakarta: Salemba.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Genesis

V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Yamin, Martinis. 2009. *Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual.*Jakarta: Gaung Persada Press.

Yang dan Miller. 2008. *Karakteristik Responden.* Jakarta: Erlangga.

Yuliani, Safrida, Nadirsyah, Usman Bakar. 2010. *Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh).* Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. 3(2): 206-220.

Zakiyudin, Ais. 2012. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi ke 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.

VII. Lampiran

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala Ukur	Nomor Kuesioner
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (X_1)	Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. (Rosmery Elsye, 2016:2)	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan d. Pelaporan e. Pertanggungjawaban f. Pengawasan (Rosmery Elsye, 2016:3)	Ordinal	1-6
Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)	Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (Nordiawan, 2010:201)	a. Pencatatan b. Pengikhtisaran c. Pelaporan (Nordiawan, 2010:201)	Ordinal	7-9
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya merupakan keempat karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. (Erlina Rasdianto,2013:8)	a. Relevan b. Andal c. Dapat dibandingkan d. Dapat dipahami (Erlina Rasdianto,2013:8)	Ordinal	10-13

Tabel 4.1
Respon Rate

Keterangan	Jumlah	Keterangan
Kuesioner yang Disebar	34	Sampel
Kuesioner yang Tidak Kembali	5	
Kuesioner yang Kembali	29	
Tingkat Pengembalian (*Response Rate*) (29/34 x 100%)	**85.29%**	-

Sumber: Hasil pengolahan data uji alat ukur, 2017

Tabel 4.6

Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas Instrumen

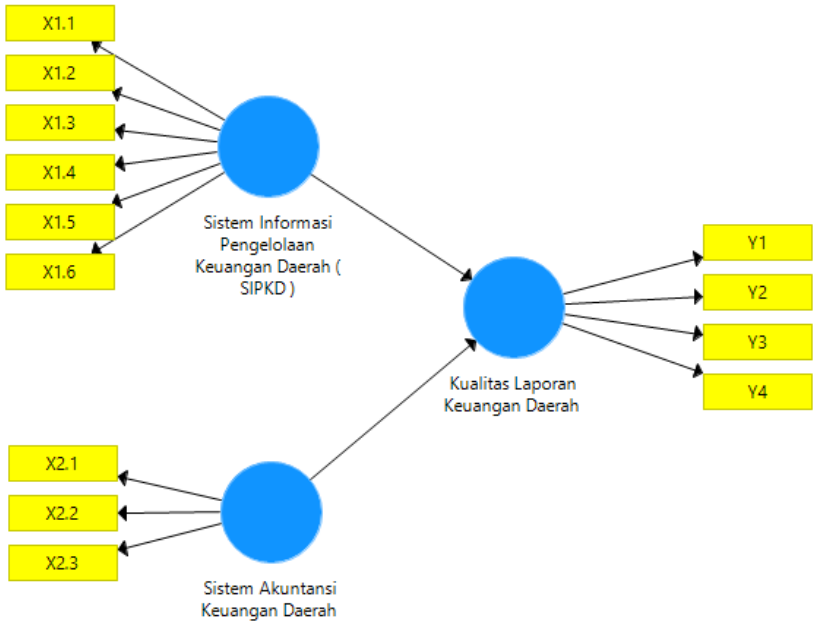
Variabel	No.	Koefisien Validitas	Titik Kritis	Keterangan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	Item 1	0.406	0.3	Valid
	Item 2	0.471	0.3	Valid
	Item 3	0.521	0.3	Valid
	Item 4	0.533	0.3	Valid
	Item 5	0.400	0.3	Valid
	Item 6	0.571	0.3	Valid
Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	Item 1	0.782	0.3	Valid
	Item 2	0.749	0.3	Valid
	Item 3	0.552	0.3	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Item 1	0.542	0.3	Valid
	Item 2	0.404	0.3	Valid
	Item 3	0.829	0.3	Valid
	Item 4	0.584	0.3	Valid

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2017

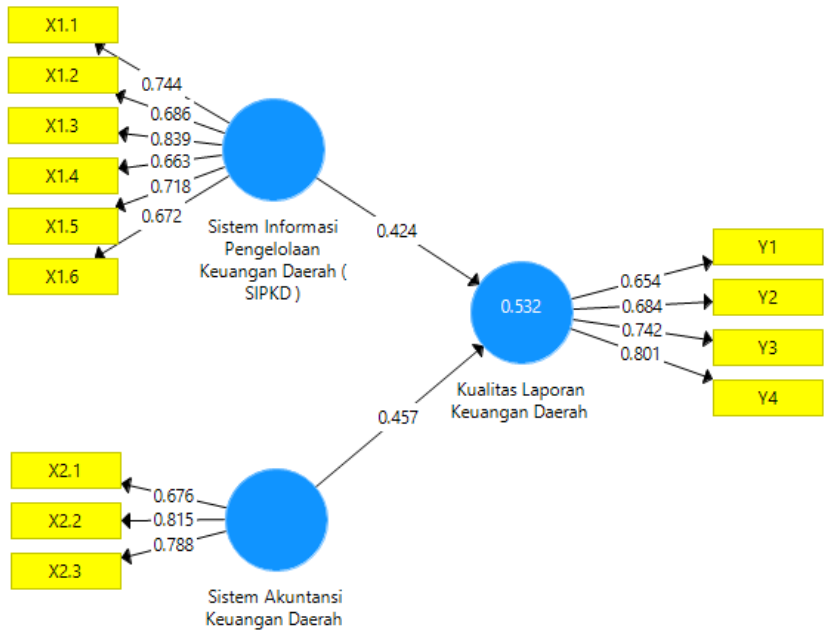
Tabel 4.7
Rekapitulasi Hasil Pengujian Reliabilitas Kuesioner

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Nilai Kritis	Kesimpulan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1)	0.867	0,7	Reliabel
Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)	0.822	0,7	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	0.767	0,7	Reliabel

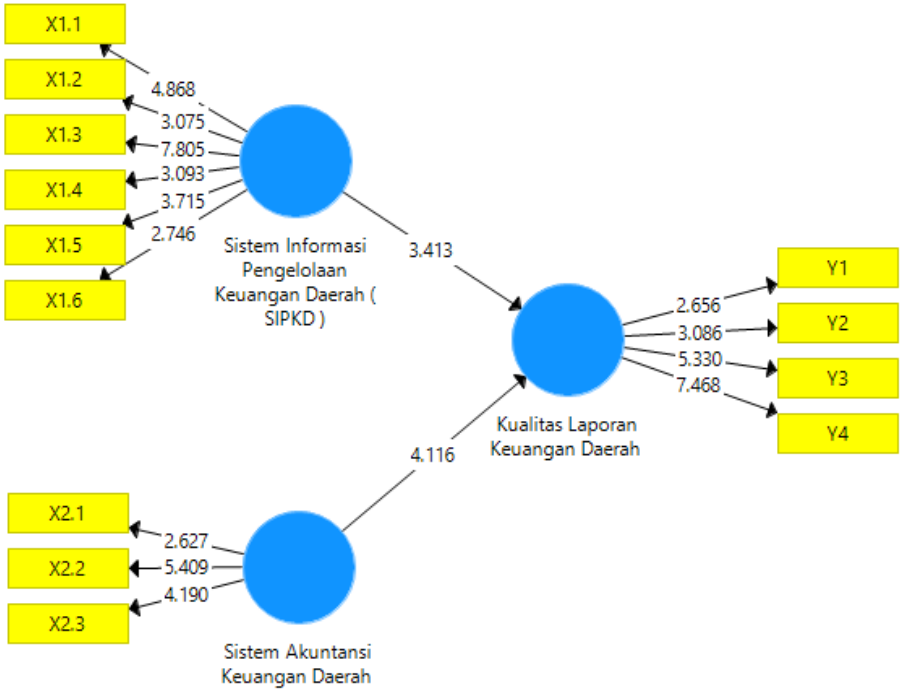
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2017



Gambar 4.1
Model Penelitian

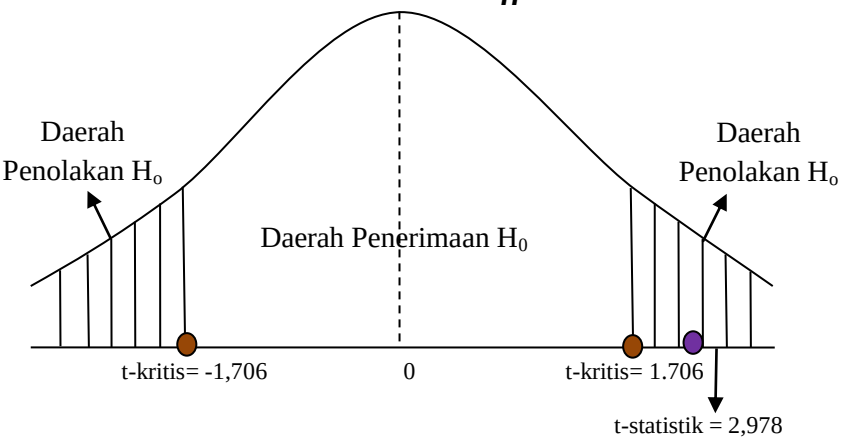


Gambar 4.2
Diagram Jalur Model Lengkap

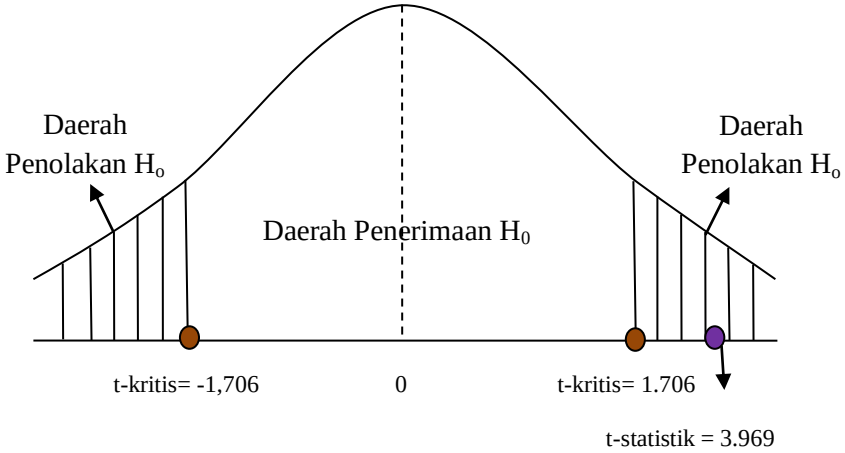


Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Gambar 4.3
Nilai *Path Coefficient*



Gambar 4.4
Kurva Uji Hipotesis Variabel X_1 terhadap Y



Gambar 4.5
Kurva Uji Hipotesis Variabel X_2 terhadap Y